

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks mengikat berbagai faktor perekonomian bagi negara berkembang. Menurut penjelasan dari Badan Pusat Statistik mengenai penduduk miskin, yaitu individu dengan pengeluaran rata-rata perbulan perkapita masih dibawah batas garis kemiskinan. Jika seorang individu memiliki pengeluaran dibawah garis kemiskinan dapat dikatakan individu tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam beberapa periode Indonesia memiliki tren kemiskinan yang cenderung menurun, kemiskinan di Indonesia umumnya disebabkan oleh upah rill, pengangguran, dan fakrot makroekonomi lain (Putri & Putri, 2021).

Kemiskinan Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun tercatat dalam persentase 9-10% pertahunnya. Hal ini merupakan jumlah yang besar untuk suatu negara. Kemiskinan di Indonesia setiap tahun terus berfluktuasi, namun dalam beberapa periode pun angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Penyebaran virus yang terjadi pada tahun 2020 di seluruh dunia menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat sebesar 0,91%, dimana pada tahun 2019 kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 9,22%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 10,19%. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan Indonesia mencapai 10,14%, angka tersebut terus turun pada tahun 2022 menjadi 9,71%.

Kemiskinan dari suatu negara merupakan permasalahan yang kompleks dan mencakup beberapa faktor. Menurut Banerjee & Duflo (2011) kemiskinan dari suatu

negara dapat disebabkan oleh upah riil dari setiap daerah cenderung timpang, rendahnya tingkat pendidikan yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, Banyak masyarakat yang menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan tetap. Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi tingkat upah dan kurangnya penyerapan tenaga kerja, Sebab, sumber daya manusia akan selalu kompetitif dalam mendapatkan suatu pekerjaan baik secara nasional maupun internasional.

Kemiskinan memiliki keterkaitan sangat lekat pada makroekonomi, faktor makroekonomi sangat penting kaitannya dalam pengentasan kemiskinan, hal ini karena kaitan mengenai pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan mempunyai kaitan yang kuat. Dapat dilihat kebijakan dalam makro ekonomi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu kemiskinan yang ada. Dalam mengatasi kasus mengenai kemiskinan diperlukan penerapan kebijakan makroekonomi yang stabil dalam mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang baik. Selain itu kebijakan pada makroekonomi yang tepat akan berdampak pada penguatan pada pasar kerja, dan kebijakan mengenai upah riil dapat menjadi faktor dalam pengentasan kemiskinan (Ames et al., 2001).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan indikator yang baik untuk mengukur kesejahteraan sosialnya karena hal ini menunjukkan bahwa masyarakat akan sejahtera jika pertumbuhan suatu negara kuat. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan kemiskinan saat ini, maka akan berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja dan pemberian upah (Mari'atus et al., 2022).

Penyebab dari kemiskinan sangat melekat pada faktor makro ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum. Menurut Suparlan

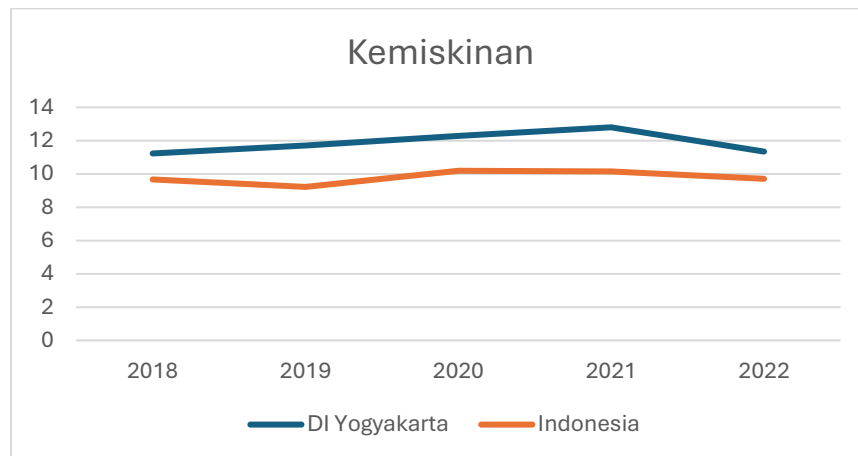
dalam (Sari, 2021) persoalan mengenai kemiskinan melekat pada pendapatan dari individu, dimana kurangnya pendapatan dari suatu individu menyebabkan ketidakmampuan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi pada suatu negara maka hal tersebut akan berdampak kepada beban makro ekonomi negara tersebut (Feriyanto et al., 2020).

Salah satu aspek utama yang mempengaruhi jumlah kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Mankiw (2000) menegaskan bahwa adanya hubungan yang terjadi secara negatif terhadap penurunan kemiskinan yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, hal tersebut di asumsikan dengan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Kemiskinan selalu terikat dengan pertumbuhan ekonomi, hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan dari suatu negara menghasilkan suatu produk, jika pertumbuhan ekonomi dari suatu negara mengalami kenaikan maka hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indikator kinerja perekonomian suatu negara adalah tingkat pertumbuhannya, dimana digambarkan jika suatu pertumbuhan ekonomi tinggi, maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat (Wiadnyana & Hadiyati, 2023).

Inflasi merupakan kenaikan dari harga pada barang yang terus menerus. Inflasi merupakan instrumen penting dalam suatu perekonomian karena akan berdampak kepada kemiskinan. Pada jangka pendek guncangan dari perubahan output dan permintaan barang akan berdampak secara asimetris terhadap kemiskinan, perubahan dari permintaan total akan berdampak langsung kepada kemiskinan (Agenor, 2005). Inflasi yang ada dan tidak kunjung ditekan maka

akan membawa kenaikan pada kemiskinan, dalam hal ini terjadi hubungan yang positif untuk peningkatan kemiskinan yang disebabkan oleh inflasi (Sianturi, 2020).

**Gambar 1. 1 Kemiskinan**



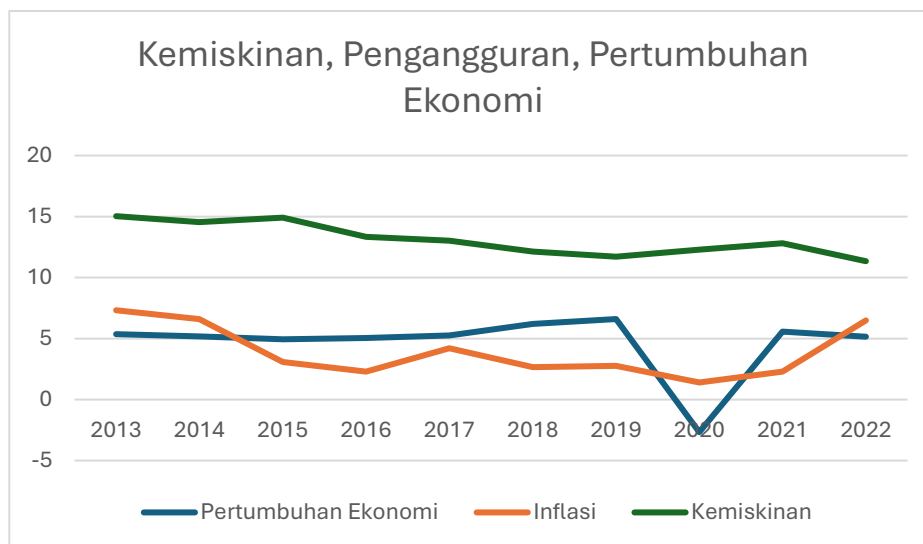
Sumber : BPS (2022), data diolah

Dilihat dari rata-rata nasional mengenai tingkat kemiskinan, dalam grafik yang ditunjukkan persentase kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta masih lebih tinggi dibandingkan nasional. Berdasarkan data, angka kemiskinan di Provinsi Yogyakarta selama lima tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan di Indonesia. Fokus utama penurunan angka kemiskinan nasional harus dilakukan pada provinsi-provinsi yang angka kemiskinannya masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pulau Jawa saat ini masih menjadi pusat ekonomi dari negara Indonesia, meskipun menjadi pusat perekonomian, dapat dikatakan perekonomian yang terjadi tidak berdampak kepada angka kemiskinan yang ada pada setiap provinsi, dalam hal ini provinsi yang menempati urutan teratas dengan persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

Penyebab utama tingginya kemiskinan di Provinsi Yogyakarta adalah permasalahan budaya dan makroekonomi.

Provinsi Yogyakarta memiliki empat kabupaten dan satu kota yang dimana menjadi pusat pemerintahan serta pusat perekonomian yang menyokong provinsi-provinsi lain. Diantara Kota/Kabupaten tersebut, Kabupaten Kulonprogo tercatat menjadi Kabupaten dengan angka kemiskinan terbesar di Provinsi Yogyakarta dengan persentase kemiskinan sebesar 16,39%, di ikuti oleh Kabupaten Gunungkidul dengan persentase kemiskinan sebesar 15,86%. Kota Yogyakarta mempunyai tingkat kemiskinan paling kecil yaitu sebesar 6,62%, jika dilihat *range* persentase angka kemiskinan antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Kulonprogo masih cukup besar, ketidakmerataan dalam perekonomian jelas terjadi antara Kabupaten yang satu dengan lainnya.

**Gambar 1. 2 Trend Kemiskinan, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi**

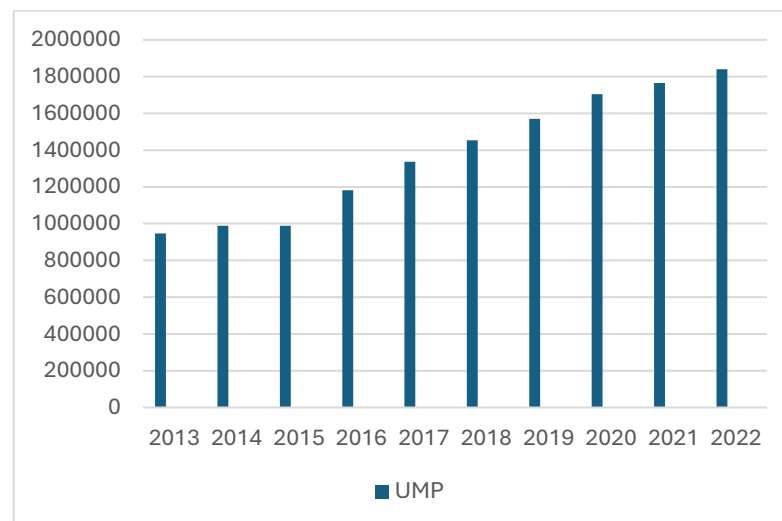


Sumber : BPS Yogyakarta (2024), data diolah

Beberapa dekade terakhir, tren kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta melebihi angka 10%. Provinsi Yogyakarta memiliki trend kemiskinan yang

cenderung menurun. Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong dalam Hard Core Poverty ( $>10\%$ ). Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Yogyakarta tersusun di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) periode 2017-2022, hal tersebut tecantum bahwa target kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 7,30%, namun pada dasarnya angka kemiskinan yang terjadi masih jauh dari target yang telah tersusun. Masalah yang menjadi penyebab dari kemiskinan yaitu mengenai pembangunan ekonomi yang belum terselesaikan dengan baik dan masalah pada makro ekonomi lainnya (Yosa, 2022).

**Gambar 1. 3 Upah Minimum Yogyakarta**



Sumber : Disnakertrans DIY 2024, data diolah

Dalam gambar 1.3 dimana upah minimum Provinsi Yogyakarta terus menerus naik. Kenaikan Upah Minimum ditafsir rata-rata mencapai 6-12% dari tahun ke tahun. Dalam periode 10 tahun kebelakang, kenaikan upah minimum yang cukup besar terjadi pada tahun 2017 sebesar 12% dari tahun sebelumnya. Pada awal pandemi upah minimum masih naik disekitar angka 7-8% setiap tahun.

Upah minimum disahkan untuk mengalami kenaikan guna menaikkan kesejahteraan dari para individu.

Dilihat dari sisi makro ekonomi Provinsi Yogyakarta, Tingkat inflasi fluktuasi, puncak naiknya tingkat inflasi terjadi pada tahun 2022, dimana pada tahun tersebut negara mulai melakukan perubahan ekonomi setelah mengalami resesi ekonomi pada 2021. Tingginya angka tingkat inflasi pada suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut belum berhasil dalam hal menekan harga komoditas.

Berdasarkan data tahun 2009 hingga 2023, bahwa di Provinsi Yogyakarta kemiskinan memiliki angka kemiskinan diatas angka rata-rata nasional. Jika dilihat dari variabel makro ekonomi, upah minimum akan terus meningkat 5-9% pertahunnya, kenaikan dari upah untuk pekerja menjadi salah satu faktor makroekonomi untuk menekan persentase angka kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Kenaikan inflasi terjadi pada beberapa tahun terakhir membuat seorang individu terpaksa mengeluarkan uang lebih memenuhi kebutuhan hidup mereka hal tersebut akan berkaitan dengan tinggi rendahnya suatu tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Yogyakarta yang tidak cukup menekan angka kemiskinan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam penurunan angka kemiskinan diperlukan kebijakan yang tepat, diperlukan sebuah penelitian yang lebih lanjut dalam mengetahui hubungan sebab akibat dari faktor makroekonomi yang ada di provinsi tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh antara Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah ada pengaruh antara Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah ada pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian diharuskan mempunyai batasan dalam ruang lingkup yang digunakan, dalam hal ini untuk mengetahui batasan yang ada di ruang lingkup penelitian adalah:



1. Penelitian ini merupakan penelitian series data rentang periode 2009-2023 dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta.
2. Penelitian ini menggunakan variabel makroekonomi seperti upah minimum, inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas, dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikatnya.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih dan menjadi bahan studi yang bagaimana upah minimum, Inflasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat memberikan masukan kepada pemerintahan setempat mengenai bagaimana upah minimum, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Yogyakarta.